



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU HERMAWANTO  
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang  
dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

HERU HERMAWANTO  
NIP 196803121998031010



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Heru Hermawanto  
 NIP : 196803121998031010  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
1	Mempercepat regenerasi kota demi mewujudkan Jakarta sebagai kota layak huni	1	Most Livable City Index (MLCI)/ Indeks Kota Layak Huni	e-SAKIP	Definisi : Studi MLCI mengukur prinsip-Prinsip Kota Layak Huni 1) Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, dsb) 2) Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan, dsb) 3) Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat 4) Keamanan 5) Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota 6) Sanitasi. Hasil studi ini sifatnya adalah "snapshot" ( <a href="http://iapindonesia.org">http://iapindonesia.org</a> ).  Metode Pengukuran : Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. (Survei dan perhitungan dilakukan oleh IAP)  Sumber Data : Hasil perhitungan IAP	N/A	N/A	N/A	63	63	Nilai
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	1	Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	e-SAKIP	Definisi : Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan pada RDTR dan RTRW.  Metode Pengukuran: Selisih antara implementasi dengan rencana dibagi dengan rencana, dengan menggunakan parameter subzona/kegiatan sesuai perda RDTR & RTRW  Sumber Data : Hasil perhitungan DCKTRP	N/A	N/A	N/A	27	27	Persentase
3	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase gedung pemda yang memenuhi standar	e-SAKIP	Definisi : Bangunan gedung pemda yang sesuai standar adalah bangunan yang sesuai dengan standar arsitektur, struktur dan ME serta berfungsi dengan baik dan terawat  Metode Pengukuran: Jumlah gedung pemda yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh gedung pemda DKI Jakarta yang terdata dikali 100 %  Sumber Data: Hasil perhitungan DCKTRP	N/A	N/A	N/A	60	60	Persentase

4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 80\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah <math>&lt; 80\%</math> maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math> dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <math>&lt; 80\%</math> dan output <math>\leq 100\%</math> Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math>, namun output <math>\leq 100\%</math> Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%) Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Persentase
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau Nomor (44)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau Nomor (44)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) Nomor (17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) Nomor (17)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
8	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase







16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p><b>Defenisi :</b> Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b> WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase <b>tersusunnya strategi komunikasi</b> program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase <b>tersusunnya editorial plan</b> sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfo menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi.</p> <p>c) Persentase <b>tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu &lt;6 jam.</b></p> <p>d) Persentase <b>terpublikasinya materi komunikasi</b> melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100	100	100	100	100	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p><b>Defenisi :</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p><b>Formulasi Pengukuran:</b> Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = &gt;90-100; A = &gt;80-90; BB = &gt;70-80; B = &gt;60-70; CC = &gt;50-60; C = &gt;30-50; D = 0-30</p> <p><b>Sumber Data :</b> Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase



**SASARAN OPERASIONAL**

22	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	100	Persentase
23	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	100	Persentase
24	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)	25	25	25	25	25	25	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,  
  
Anies Raszyd Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022  
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta,  
  
Henu Hemawan  
NIP 196803121998031010